

Judul : Revisi UU MD3: Penambahan Pimpinan DPR Kembali Bergulir
Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

:: REVISI UU MD3

Penambahan Pimpinan DPR Kembali Bergulir

JAKARTA - Rencana penambahan pimpinan DPR dan MPR melalui revisi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan kembali digulirkan pada awal 2018 setelah sebelumnya sempat vakum selama setahun. Penambahan pimpinan DPR dan MPR ini diperkirakan lebih rasional atau tidak akan terlampaui sangat banyak.

"Segalasesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Golkar konsisten mendorong penambahan pimpinan DPR. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang pemilu yaitu PDIP," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut politikus Partai Golkar ini, Fraksi Partai Golkar mengusulkan

penambahan satu pimpinan MPR selain penambahan pimpinan DPR. Kalaupun ada usulan penambahan lagi, maksimal penambahan cukup dua pimpinan DPR dan MPR. "Maksimal tambah dua, satu PDIP, satu belum tahu siapa yang akan dapatkan," ujarnya.

Hal yang sudah jelas, menurut Firman, penambahan pimpinan DPR dan MPR ini rasional saja karena DPR periode saat ini tinggal 1,5 tahun. Namun, UU MD3 sudah menjadi undang-undang

inisiatif dan masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Karena itu, baiknya DPR segera menyelesaikan. "Semua undang-undang tertunda diselesaikan, (kapan waktunya) lebih cepat lebih bagus," paparnya.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan bahwa Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PPP sudah diinformasikan bahwa revisi UU MD3 akan dilanjutkan lagi pada masa sidang yang akan datang, 9 Januari 2018. "Poksi PPP di Baleg memang sudah diinformasikan bahwa revisi UU MD3 akan mulai kembali dibahas pada masa sidang yang akan datang," katanya.

Menurut anggota Komisi III itu, seluruh fraksi sudah menyetujui penambahan satu pimpinan DPR untuk fraksi PDIP saja. Jadi, kalau ada usulan penambahan lain, itu belum mendapatkan persetujuan dari fraksi-fraksi. "Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, dalam hal ini PKB, itu belum bulat, bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto mengatakan, meskipun revisi UU MD3 telah mendapatkan persetujuan pemerintah, pembahasannya macet

lagi di Baleg dan belum ada rapat lagi hingga akhir masa sidang kemarin. "Jadi, belum bisa disiapkan nama-nama yang bakal masuk pimpinan DPR maupun MPR," kata Bambang.

Menurut dia, ketika proses pembahasan undang-undang macet di Baleg, tentu pembahasan itu bisa dihidupkan kembali kemudian. Bisa diambil keputusan soal pasal yang akan direvisi, dibawa ke pimpinan DPR, baru kemudian disahkan di rapat paripurna. Dan yang menyebabkan pembahasan macet adalah soal penambahan jumlah pimpinan DPR dan pimpinan

MPR yang mau diputuskan. "Semua fraksi setuju penambahan untuk pimpinan DPR dan MPR dari PDIP. Tetapi, fraksi lain juga ingin ikut masuk sebagai pimpinan DPR dan MPR juga. Ini yang membuat situasi sulit dan macet," ungkapnya.

Menurut dia, norma hukum dalam pasal sulit dipenuhi untuk usulan penambahan fraksi lain. Khusus untuk PDIP, sebagai partai pemenang pemilu, tentu sah saja. "Kalau tidak ditemukan (norma), ya akan bikin DPR sebagai lembaga legislasi ditertawakan orang," ujarnya.

■ kiswondari



FIRMAN SOEBAGYO